



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Kabupaten Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 21);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolah Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

2. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 438 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp.	652.239.752.824,91
b. Belanja	Rp.	<u>667.111.253.483,96</u>
Surplus/(Defisit).....	Rp.	(14.871.500.659,05)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan Pembiayaan.....	Rp.	44.743.307.480,58
- Pengeluaran Pembiayaan.....	Rp.	<u>19.606.708.358,07</u>
Surplus/(defisit).....	Rp.	25.136.599.122,51

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah **Rp. (40.254.365.168,09)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp.	692.494.117.993,00
b. Realisasi.....	Rp.	<u>652.239.752.824,91</u>
Selisih lebih/(berkurang)	Rp.	(40.254.365.168,09)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah **Rp. 56.167.423.897,62** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan.....	Rp.	723.278.677.381,58
b. Realisasi.....	Rp.	<u>667.111.253.483,96</u>
Selisih lebih/(berkurang)	Rp.	56.167.423.897,62
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah **Rp. (15.913.058.729,53)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ Devisit setelah Perubahan.....	Rp.	(30.784.559.388,58)
b. Realisasi.....	Rp.	<u>(14.871.500.659,05)</u>
selisih lebih /(berkurang)	Rp.	(15.913.058.729,53)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah **Rp. (7.540.114.408,00)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Setelah Perubahan.....	Rp. 52.283.421.888,58
b. Realisasi.....	<u>Rp. 44.743.307.480,58</u>
selisih lebih /(berkurang)	Rp. (7.540.114.408,00)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah **Rp. 1.892.154.141,93** dengan rincian sebagai berikut :

a. Setelah Perubahan.....	Rp. 21.498.862.500,00
b. Realisasi.....	<u>Rp. 19.606.708.358,07</u>
selisih lebih /(berkurang)	Rp. (1.892.154.141,93)

Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah **Rp. (9.432.268.549,93)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 30.784.559,388,58
b. Realisasi	<u>Rp. 25.136.599.122,51</u>
selisih lebih /(berkurang)	Rp. (9.432.268.549,93)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 781.623.574.293,67
b. Jumlah kewajiban	Rp. 15.252.734.883,47
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 766.370.839.410,20

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampaidengan 31 Desember 2011 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2011	Rp	28.384.384.933,58
b. Arus Kas dari aktifitas operasi	Rp	114.795.872.561,97
c. Arus Kas dari aktifitas investasi aset non keuangan	Rp	(129.824.194.541,02)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(3.680.356.192,07)
e. Arus Kas dari aktivitas nonanggaran	Rp	(00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2011	Rp	10.552.450.186,50

Pasal 6

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- Lampiran II : Neraca;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran lampiran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ; dan
- b. Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di tetapkan di Polewali
pada tanggal, 10 Oktober 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLWALI MANDAR,

ISMAIL, AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 03